

PARADIPLOMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL: STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA DI ERA KEPEMIMPINAN SHERLY TJOANDA

Mariana Harti Panjaitan¹, Putri Damaiyanti Pasaribu²

^{1,2}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia

Email: marianapanjaitan471@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun kerja sama ekonomi internasional pada era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, dengan fokus pada kerja sama dengan Republik Korea. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi diarahkan untuk menarik investasi, mendorong hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta membuka peluang kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan dengan Pemerintah Korea pada April 2026 membahas peluang kerja sama di sektor pertambangan, energi, perikanan, dan pariwisata. Keterlibatan perusahaan Korea dalam industri pengolahan nikel menunjukkan hubungan antara paradiplomasi, investasi, dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa koordinasi pemerintah, kapasitas kelembagaan, pemerataan manfaat investasi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa paradiplomasi dapat menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat kerja sama ekonomi internasional dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Paradiplomasi, Pemerintah Daerah, Kerja Sama Internasional, Investasi Asing, Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Abstract

This study analyzes the paradiplomacy of the North Maluku Provincial Government in establishing international economic cooperation during the leadership of Governor Sherly Tjoanda, focusing specifically on cooperation with the Republic of Korea. The research employs a descriptive qualitative approach utilizing document and literature reviews. The findings indicate that this paradiplomacy aims to attract investment, promote the downstream processing of natural resources, enhance economic value-added, and create opportunities for employment and human resource development. Meetings with the Korean government in April 2026 addressed potential cooperation in the mining, energy, fisheries, and tourism sectors. The involvement of Korean companies in the nickel processing industry illustrates the link between paradiplomacy, investment, and regional economic development. However, implementation still faces challenges regarding government coordination, institutional capacity, the equitable distribution of investment benefits, community participation, and environmental protection. The study concludes that paradiplomacy can serve as a strategic instrument for the North Maluku Provincial Government to strengthen international economic cooperation and support sustainable regional development.

Keywords: *Paradiplomacy, Local Government, International Cooperation, Foreign Investment, North Maluku, Sherly Tjoanda.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan desentralisasi telah memperluas keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional. Pemerintah daerah tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif di tingkat domestik, tetapi juga dapat terlibat dalam berbagai aktivitas internasional yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah. (Utomo, 2022) menjelaskan bahwa perkembangan paradiplomasi di Indonesia berkaitan dengan proses desentralisasi kekuasaan, meningkatnya pengaruh isu global pada tingkat daerah, serta perubahan struktur kelembagaan negara yang membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan aktivitas kerja sama internasional. Dalam konteks tersebut, paradiplomasi dapat menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah melalui hubungan dengan aktor internasional. Dalam perkembangannya, paradiplomasi tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya, tetapi juga semakin diarahkan pada kepentingan ekonomi. Pemerintah daerah berupaya memanfaatkan hubungan internasional sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah melalui promosi investasi, kerja sama perdagangan, pengembangan industri, pariwisata, transfer teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. (Pestovska, 2026) menunjukkan bahwa paradiplomasi atau city diplomacy dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan identitas wilayah, penerapan prinsip ESG, pengembangan ekosistem inovasi, dan hubungan langsung dengan aktor ekonomi internasional. Dengan demikian, paradiplomasi dapat dipahami sebagai salah satu strategi pemerintah daerah dalam menghubungkan potensi lokal dengan sumber daya, investasi, dan peluang yang tersedia pada tingkat global.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan paradiplomasi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan kepentingan daerah, termasuk melalui kerja sama dengan pihak asing. Namun, ruang tersebut tidak berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan politik luar negeri secara mandiri. Aktivitas kerja sama internasional daerah tetap harus berada dalam kerangka politik luar negeri nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kerja sama daerah, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri. (PP NOMOR 28 TAHUN 2018, 2018) Oleh karena itu, praktik paradiplomasi di Indonesia pada dasarnya merupakan aktivitas subnasional yang berjalan berdampingan dan terkoordinasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kebutuhan terhadap paradiplomasi semakin relevan ketika pemerintah daerah memiliki potensi sumber daya ekonomi yang membutuhkan akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan jaringan internasional. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga dapat menjalankan fungsi sebagai fasilitator, mediator, promotor investasi, dan penghubung antara kepentingan daerah dengan aktor ekonomi internasional. (Harakan & Taufik, 2023) menunjukkan bahwa hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan penanaman modal asing dapat menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, kerja sama tersebut juga menghadapi tantangan berupa pemerataan manfaat ekonomi, keterlibatan masyarakat, dan kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan agar aktivitas investasi memberikan manfaat bagi pembangunan lokal.

Konteks tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya mineral dan nikel, serta memiliki potensi pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata. Perkembangan industri pengolahan dan hilirisasi nikel telah menempatkan Maluku

Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan industri berbasis sumber daya alam di Indonesia. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat bahwa ekonomi Maluku Utara pada triwulan II tahun 2025 tumbuh sebesar 32,09 persen secara *year-on-year* dan 5,16 persen secara *quarter-to-quarter*. (BPS Maluku Utara, 2025) Pertumbuhan tersebut berlangsung dalam konteks meningkatnya aktivitas industri dan ekspor, khususnya yang berkaitan dengan komoditas hasil hilirisasi nikel.

Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 32,09 persen pada triwulan II 2025, yang antara lain didorong oleh peningkatan produksi komoditas hasil hilirisasi nikel dan ekspor barang dan jasa. (BANK INDONESIA, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor hilirisasi memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Maluku Utara. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa manfaat pembangunan telah terdistribusi secara merata. Ketergantungan terhadap sektor berbasis sumber daya alam juga dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti risiko lingkungan, ketimpangan manfaat ekonomi, keterbatasan keterlibatan masyarakat lokal, dan ketergantungan terhadap komoditas tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keterlibatan dalam jaringan ekonomi internasional tidak hanya menghasilkan peningkatan investasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menjadi penting untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana pemerintah daerah mengembangkan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan pembangunan ekonomi daerah. Salah satu perkembangan yang relevan adalah penguatan hubungan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Republik Korea. Hubungan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menghubungkan potensi ekonomi Maluku Utara dengan peluang kerja sama dan investasi dari aktor internasional.

Pada April 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan hubungan strategis serta peluang pengembangan kerja sama pada sektor pertambangan, energi, perikanan, dan pariwisata. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menekankan pentingnya keberlanjutan, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan hubungan tersebut. (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROVINSI MALUKU UTARA, 2026) Pertemuan ini menunjukkan bahwa hubungan luar negeri daerah mulai diarahkan pada kepentingan pembangunan yang lebih konkret, khususnya dalam membuka peluang ekonomi dan memperkuat kerja sama sektoral.

Hubungan tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan perusahaan Korea dalam pengembangan industri pengolahan nikel di Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut disebutkan keterlibatan POSCO melalui skema *joint venture* dalam pengembangan industri pengolahan nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa paradiplomasi ekonomi tidak hanya mencakup hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah asing, tetapi juga dapat membuka ruang interaksi dengan perusahaan dan jaringan bisnis internasional. Dalam posisi tersebut, pemerintah daerah berperan menghubungkan kepentingan pembangunan daerah dengan modal, teknologi, dan jaringan ekonomi global, sekaligus memastikan agar investasi tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Meskipun demikian, praktik paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan. (Novialdi et al., 2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peluang untuk memanfaatkan hubungan internasional dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi praktik tersebut masih menghadapi tantangan kelembagaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam perspektif (Mukti, 2020), ruang gerak

paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia relatif terbatas karena aktivitas yang memiliki dimensi hubungan luar negeri tetap berada dalam kerangka kewenangan negara. Kondisi tersebut berbeda dengan Korea Selatan yang memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah daerahnya untuk mengembangkan kepentingan regional melalui hubungan internasional, sepanjang tidak memasuki kewenangan politik luar negeri pemerintah pusat. Perbedaan tersebut menjadi penting dalam memahami bagaimana paradiplomasi Maluku Utara dengan Republik Korea dapat berlangsung dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Selain persoalan kewenangan, tantangan lain berkaitan dengan bagaimana manfaat hubungan ekonomi internasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Masuknya investasi dan berkembangnya industri belum tentu secara otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya keterlibatan tenaga kerja lokal, penguatan pelaku usaha daerah, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, dan keterhubungan investasi dengan perekonomian lokal. Dengan demikian, keberhasilan paradiplomasi tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah investasi atau intensitas hubungan dengan aktor asing, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah daerah mengubah hubungan internasional tersebut menjadi manfaat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai paradiplomasi di Indonesia sebelumnya telah banyak membahas peluang, tantangan, dan bentuk hubungan internasional pemerintah daerah. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji paradiplomasi dalam konteks daerah yang sedang mengalami ekspansi industri berbasis hilirisasi sumber daya alam dan pada saat yang sama membangun hubungan ekonomi dengan negara mitra tertentu. Penelitian ini menempatkan Provinsi Maluku Utara sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menggunakan paradiplomasi dalam membangun hubungan ekonomi dengan Republik Korea pada era kepemimpinan Sherly Tjoanda. Fokus tersebut penting karena hubungan Maluku Utara dan Korea tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga menyentuh persoalan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, keberlanjutan lingkungan, serta hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun kerja sama ekonomi internasional pada era kepemimpinan Sherly Tjoanda, dengan fokus pada hubungan dengan Republik Korea. Penelitian ini secara khusus menganalisis bentuk paradiplomasi yang dilakukan, orientasi ekonomi dari hubungan tersebut, peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi investasi dan hilirisasi, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian paradiplomasi di Indonesia, khususnya mengenai peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan hubungan internasional sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah yang tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan konsep yang menjelaskan keterlibatan pemerintah subnasional dalam hubungan internasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam kajian ilmiah oleh Panayotis Soldatos pada dekade 1980-an. Menurut (Mukti, 2020), paradiplomasi mengacu pada kapasitas pemerintah daerah sebagai entitas subnasional untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah. Dalam konteks Indonesia, praktik paradiplomasi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kewenangan pemerintah pusat. Paradiplomasi berkaitan dengan aktivitas lintas negara yang dilakukan oleh aktor subnegara seperti pemerintah provinsi, kota, atau pemerintah daerah.

Dalam perkembangannya, paradiplomasi muncul karena semakin terbukanya ruang internasional bagi aktor non-negara.(Novialdi et al., 2022) Pemerintah daerah dapat membangun hubungan dengan aktor luar negeri untuk memperoleh keuntungan ekonomi, teknologi, pengetahuan, investasi, maupun pengembangan kapasitas.

(Dermawan et al., 2020) menjelaskan bahwa diplomasi daerah berkaitan dengan keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri untuk merepresentasikan daerah sekaligus memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan daerah. Aktivitas tersebut dapat mencakup bidang ekonomi, politik, dan kerja sama. Dengan demikian, dalam penelitian ini paradiplomasi dipahami sebagai aktivitas Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam membangun dan mengembangkan hubungan dengan aktor luar negeri untuk mencapai kepentingan pembangunan daerah, khususnya kepentingan ekonomi, investasi, industri, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Paradiplomasi Ekonomi

Paradiplomasi ekonomi merupakan salah satu bentuk paradiplomasi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi daerah. Bentuknya dapat berupa promosi investasi, perdagangan internasional, kerja sama industri, pengembangan pariwisata, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.(Mukti, 2020) Pemerintah daerah dapat berfungsi sebagai planner, fasilitator, mediator, regulator, dan promotor dalam kerja sama ekonomi dengan pihak asing.

Penelitian Harakan dan Taufik menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan investasi asing dapat berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.(Harakan & Taufik, 2023) Dalam konteks Maluku Utara, konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan hubungan dengan Republik Korea untuk mengembangkan sektor pertambangan, energi, perikanan, pariwisata, dan industri pengolahan.

3. Paradiplomasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Paradiplomasi ekonomi tidak hanya dapat diukur berdasarkan besarnya investasi yang masuk, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Investasi asing dapat menghasilkan manfaat berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur (Mukti, 2020). Namun, investasi juga memiliki risiko berupa kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, kerja sama ekonomi Maluku Utara dengan Republik Korea perlu dilihat melalui tiga dimensi:

- a. Dimensi ekonomi, yaitu investasi, industri, perdagangan, dan nilai tambah;
- b. Dimensi sosial, yaitu lapangan kerja, kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat;
- c. Dimensi lingkungan, yaitu penerapan industri yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

4. Pemerintah Daerah sebagai Aktor Hubungan Internasional

Paradiplomasi memperlihatkan adanya perubahan aktor dalam hubungan internasional. Hubungan internasional tidak lagi sepenuhnya berpusat pada pemerintah nasional. Pemerintah daerah juga dapat memainkan peran strategis dalam membangun jaringan internasional sesuai kepentingan daerah. (Dermawan et al., 2020) menunjukkan bahwa globalisasi telah mendorong pemerintah subnasional untuk mencari sumber-sumber global sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Namun, aktivitas tersebut tetap tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat. Hubungan luar negeri pemerintah daerah harus tetap berjalan dalam kerangka kebijakan luar

negeri nasional. Karena itu, paradiplomasi bukanlah bentuk diplomasi yang berdiri sendiri, melainkan aktivitas subnasional yang harus terkoordinasi dengan sistem hubungan luar negeri negara.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan studi literatur. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan paradiplomasi pemerintah daerah, kerja sama ekonomi internasional, investasi asing, serta hubungan pemerintah daerah dengan mitra internasional. Penggunaan studi pustaka dalam penelitian mengenai paradiplomasi juga dilakukan oleh (Utomo, 2022), yang mengkaji perkembangan paradiplomasi di Indonesia melalui penelusuran dokumen resmi mengenai otonomi daerah dan kerja sama internasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga negara (seperti BPS dan Bank Indonesia), serta siaran pers resmi pemerintah daerah. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan, bentuk kerja sama, peran pemerintah daerah, serta perkembangan hubungan ekonomi internasional Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mitra internasional, khususnya Republik Korea.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan dokumentasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Literatur kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu paradiplomasi, kerja sama ekonomi internasional, diplomasi ekonomi daerah, investasi asing, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi informasi yang relevan dari berbagai sumber, membandingkan temuan antarliteratur, kemudian menginterpretasikannya berdasarkan konsep paradiplomasi dan kerja sama ekonomi internasional. Keabsahan data sekunder dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan menyelaraskan data dari laporan statistik pemerintah (BPS, BI), regulasi perundang-undangan (PP No. 28/2018), rilis pers kedinasan (Biro Adpim Malut), serta literatur akademik terakreditasi.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara langsung atau observasi lapangan. Oleh karena itu, seluruh perincian interaksi tingkat mikro (seperti peran fasilitator dan regulator Pemprov) dianalisis murni berbasis bukti dokumenter dan publikasi data sekunder terverifikasi. Keterbatasan metodologis ini diakui secara eksplisit agar kerangka interpretasi penelitian tetap proporsional dan transparan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradiplomasi sebagai Strategi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi menjadi salah satu ruang bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membangun hubungan dengan aktor internasional dalam rangka mendukung kepentingan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, paradiplomasi tidak dipahami sebagai bentuk politik luar negeri yang terpisah dari pemerintah pusat, melainkan sebagai aktivitas pemerintah daerah dalam menjalin hubungan dengan pihak luar negeri sesuai dengan kewenangan dan kepentingan daerah.

Menurut (Mukti, 2020), paradiplomasi merupakan aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah subnasional untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan paradiplomasi tetap berada dalam kerangka hubungan luar negeri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, aktivitas internasional

pemerintah daerah membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan nasional.

Bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, orientasi paradiplomasi memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan ekonomi daerah. Potensi sumber daya alam, terutama nikel, serta sektor perikanan, energi, dan pariwisata menjadi modal penting dalam membangun hubungan ekonomi dengan mitra internasional. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional diarahkan tidak hanya untuk membangun hubungan kelembagaan, tetapi juga membuka peluang investasi, memperluas kerja sama ekonomi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat daerah.

2. Upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara Membangun Kerja Sama dengan Republik Korea Selatan

Salah satu bentuk aktual keterlibatan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam paradiplomasi ekonomi terlihat melalui hubungan dengan Republik Korea. Pada April 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Jakarta. Pertemuan tersebut menunjukkan adanya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan perwakilan negara asing untuk membahas kepentingan pembangunan daerah. Sektor yang dibahas meliputi pertambangan, energi, perikanan, dan pariwisata. Dalam perspektif paradiplomasi, kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah subnasional untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus membuka ruang kerja sama yang dapat mendukung kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pola tersebut sejalan dengan perkembangan paradiplomasi di Indonesia yang menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap hubungan internasional untuk kepentingan pembangunan. Syuryansyah & Nihayati (2025) menunjukkan bahwa praktik paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia banyak berkaitan dengan kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi pelaksanaannya tetap menghadapi persoalan koordinasi dengan pemerintah pusat dan keterbatasan kelembagaan. Dengan demikian, hubungan Maluku Utara dengan Republik Korea perlu dipahami sebagai bagian dari aktivitas subnasional yang diarahkan untuk kepentingan pembangunan daerah, bukan sebagai kebijakan luar negeri yang berdiri sendiri.

Dari sisi orientasi, kerja sama tersebut juga menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan beberapa sektor ekonomi sekaligus. Selain pertambangan dan industri pengolahan, pemerintah daerah membahas energi, perikanan, dan pariwisata. Diversifikasi tersebut penting karena pembangunan ekonomi daerah yang terlalu bergantung pada satu komoditas dapat meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga dan permintaan global. Oleh sebab itu, paradiplomasi ekonomi dapat diarahkan tidak hanya untuk memperoleh investasi, tetapi juga memperluas jaringan ekonomi daerah pada berbagai sektor potensial.

Temuan tersebut sejalan dengan (Putri et al., 2026) yang menunjukkan bahwa paradiplomasi ekonomi dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat investasi, ekspor, konektivitas ekonomi, serta pengembangan sektor ekonomi lainnya. Akan tetapi, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan harmonisasi regulasi.

3. Paradiplomasi Ekonomi, Investasi, dan Hilirisasi Nikel

Sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel menjadi salah satu konteks penting dalam hubungan ekonomi Maluku Utara dengan mitra internasional. Posisi Maluku Utara sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel yang

berkembang menjadikan sektor tersebut memiliki arti strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Data BPS menunjukkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 32,09 persen secara tahunan (year-on-year). (BANK INDONESIA, 2025) Pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi daerah, sementara Bank Indonesia juga mengaitkan perkembangan ekonomi Maluku Utara dengan meningkatnya aktivitas hilirisasi nikel, produksi komoditas, dan ekspor.

Kondisi tersebut memberikan konteks penting bagi praktik paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hubungan dengan mitra internasional tidak hanya diarahkan untuk menarik investasi dalam bentuk eksploitasi bahan mentah, tetapi semakin berkaitan dengan bagaimana sumber daya alam dapat diolah sehingga menghasilkan nilai tambah. Dalam hal ini, hilirisasi menjadi titik temu antara kepentingan investasi, pembangunan industri, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Keterlibatan perusahaan asal Republik Korea dalam pengembangan industri pengolahan di kawasan Weda Bay Industrial Park juga memperlihatkan adanya keterhubungan antara investasi internasional dan potensi ekonomi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menempatkan kondisi investasi yang kondusif, transparan, dan akuntabel sebagai bagian penting dalam mendukung perkembangan industri sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan daerah.

Dengan demikian, paradiplomasi ekonomi Maluku Utara dapat dilihat bukan semata-mata sebagai aktivitas promosi investasi, tetapi sebagai upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan hubungan ekonomi internasional agar memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan daerah.

4. Peran Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai Fasilitator, Mediator, dan Regulator

Dalam praktiknya, pemerintah daerah tidak selalu menjadi pihak yang melakukan transaksi ekonomi secara langsung dengan investor asing. Peran yang lebih dominan adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan kerja sama tersebut berkembang. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berperan sebagai fasilitator dengan memperkenalkan potensi daerah, membuka komunikasi dengan mitra internasional, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Peran tersebut menjadi penting karena investasi asing tidak hanya berkaitan dengan masuknya modal, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat berupa penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas ekonomi daerah apabila didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat. (Chrystella et al., 2025)

Selain sebagai fasilitator, pemerintah daerah juga memiliki peran sebagai mediator antara kepentingan investasi dan kepentingan masyarakat. Kehadiran investasi harus diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan agar manfaat ekonomi dari investasi tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Sementara itu, sebagai regulator, pemerintah daerah berkepentingan memastikan bahwa aktivitas investasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan. (Huixiang et al., 2022) menunjukkan bahwa tekanan dan regulasi lingkungan dari pemerintah daerah dapat memengaruhi strategi lingkungan perusahaan, sehingga fungsi regulasi dan pengawasan pemerintah menjadi penting dalam mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan dengan penekanan Pemerintah Provinsi

Maluku Utara mengenai investasi yang transparan, akuntabel, berwawasan lingkungan, serta memiliki tanggung jawab sosial terhadap Masyarakat.(Syam et al., 2026)

Peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan paradiplomasi ekonomi tidak cukup diukur dari jumlah investasi yang masuk. Lebih jauh, keberhasilan perlu dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menghubungkan investasi dengan kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, optimalisasi investasi membutuhkan kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan agar aktivitas investasi memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.(Chrystella et al., 2025)

5. Nilai Tambah dan Manfaat Ekonomi bagi Daerah

Salah satu tujuan utama paradiplomasi ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah memperoleh manfaat ekonomi dari keterlibatan daerah dalam hubungan internasional. Investasi dan kerja sama ekonomi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks hilirisasi nikel, nilai tambah tidak hanya berasal dari peningkatan aktivitas produksi, tetapi juga dari berkembangnya industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menekankan pentingnya agar pengelolaan sumber daya alam menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat.

Namun demikian, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama. Pertumbuhan yang kuat perlu diikuti dengan distribusi manfaat yang lebih merata, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, dan penguatan kapasitas tenaga kerja daerah. (Harakan & Taufik, 2023) menunjukkan bahwa kerja sama pemerintah daerah dengan investasi asing dapat menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan, tetapi tetap menghadapi tantangan terkait pemerataan manfaat dan partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu, paradiplomasi ekonomi Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu diarahkan pada pembangunan hubungan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi, tetapi juga menghasilkan local economic benefits yang nyata bagi masyarakat.

6. Paradiplomasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dalam menganalisis paradiplomasi ekonomi Maluku Utara. Ketergantungan yang besar terhadap sektor pertambangan dan hilirisasi memberikan peluang ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam aspek lingkungan dan sosial.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam komunikasinya dengan pihak Republik Korea Selatan menekankan pentingnya pembangunan industri yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Paradiplomasi dengan demikian tidak hanya dapat dipahami sebagai instrumen untuk menarik modal asing, tetapi juga sebagai sarana membangun standar dan orientasi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kerja sama internasional dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh akses terhadap teknologi, pengetahuan, jaringan ekonomi, dan praktik industri yang mendukung peningkatan efisiensi serta keberlanjutan.

Meskipun demikian, keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan dalam agenda kerja sama. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa prinsip tersebut diterjemahkan dalam pengawasan terhadap aktivitas industri, pemenuhan kewajiban perusahaan, perlindungan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

7. Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Praktik Paradiplomasi

Praktik paradiplomasi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara yang memberikan kewenangan hubungan luar negeri lebih luas kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan politik luar negeri secara independen. Aktivitas kerja sama internasional daerah tetap harus berada dalam kerangka kewenangan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, hubungan internasional yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus ditempatkan dalam kerangka koordinasi antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional. (Mukti, 2020) menjelaskan bahwa ruang gerak paradiplomasi pemerintah daerah di Indonesia relatif terbatas karena hubungan luar negeri merupakan ranah strategis pemerintah pusat. Sementara itu, (S. Surwandono, 2020) menunjukkan bahwa arsitektur paradiplomasi Indonesia cenderung bersifat administratif, prosedural, dan teknis. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi daerah ketika ingin mengembangkan hubungan internasional secara lebih cepat dan fleksibel.

Dalam konteks Maluku Utara, koordinasi pusat-daerah menjadi penting karena kerja sama ekonomi dengan pihak asing dapat bersinggungan dengan berbagai kewenangan nasional, terutama investasi, perdagangan internasional, lingkungan, dan hubungan luar negeri. Karena itu, paradiplomasi daerah yang efektif bukan berarti mengambil alih kewenangan pemerintah pusat, tetapi membangun sinergi agar kepentingan daerah dapat diperjuangkan dalam kerangka kepentingan nasional.

8. Tantangan dan Peluang Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Praktik paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki sejumlah peluang. Pertama, potensi sumber daya alam dan posisi Maluku Utara dalam rantai industri nikel memberikan daya tarik bagi investor internasional. Kedua, hubungan ekonomi dengan Republik Korea membuka peluang pengembangan kerja sama dalam bidang industri, energi, perikanan, pariwisata, teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Ketiga, agenda hilirisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi di dalam daerah.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dapat meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi terhadap komoditas tertentu. Selain itu, perkembangan industri skala besar dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial apabila tidak disertai dengan pengawasan yang kuat. Tantangan lainnya adalah memastikan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga memperoleh manfaat dari investasi melalui kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, pengembangan usaha lokal, dan keterlibatan dalam proses pembangunan.

Dalam pengembangan kerja sama ekonomi internasional, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya berperan dalam mendorong masuknya investasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan investasi tetap memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik perekonomian Maluku Utara yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam. (Huixiang et al., 2022) menunjukkan bahwa tekanan regulasi lingkungan dari pemerintah daerah dapat memengaruhi strategi lingkungan perusahaan, terutama melalui penerapan regulasi yang lebih ketat dan dukungan pemerintah terhadap praktik pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam kerja sama ekonomi tidak cukup hanya sebagai fasilitator investasi, tetapi juga sebagai regulator yang

memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada era kepemimpinan Sherly Tjoanda mulai diarahkan pada pemanfaatan hubungan internasional sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Hubungan dengan Republik Korea menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk membangun komunikasi internasional, membuka peluang investasi, mendukung hilirisasi, serta mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Namun, efektivitas paradiplomasi tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memastikan bahwa keterbukaan terhadap investasi menghasilkan nilai tambah, manfaat yang lebih merata, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, paradiplomasi Maluku Utara dapat dipahami sebagai strategi pembangunan daerah yang menghubungkan potensi lokal dengan jaringan ekonomi internasional, tetapi tetap berada dalam batas kewenangan dan koordinasi sistem pemerintahan Indonesia.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada era kepemimpinan Sherly Tjoanda menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui hubungan dan komunikasi dengan aktor internasional. Praktik tersebut terlihat dari upaya pemerintah daerah membangun hubungan dengan Republik Korea melalui pembahasan peluang kerja sama pada sektor strategis, seperti pertambangan, energi, perikanan, dan pariwisata. Paradiplomasi yang dilakukan tidak berdiri sebagai politik luar negeri yang terpisah dari pemerintah pusat, tetapi merupakan aktivitas subnasional yang diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi daerah dalam kerangka kebijakan nasional. Dalam konteks ekonomi, paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki keterkaitan yang kuat dengan investasi dan hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel. Pemerintah daerah berupaya memanfaatkan potensi ekonomi tersebut untuk menarik dan memperkuat hubungan dengan mitra internasional sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, orientasi paradiplomasi tidak hanya terletak pada masuknya investasi, tetapi juga pada bagaimana investasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan paradiplomasi ekonomi menghadapi sejumlah tantangan. Pertumbuhan ekonomi dan investasi belum secara otomatis menjamin pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri menjadikan koordinasi dengan pemerintah pusat sebagai faktor penting dalam pelaksanaan kerja sama internasional daerah. Dengan demikian, efektivitas paradiplomasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menghubungkan kepentingan internasional dengan kebutuhan pembangunan lokal. Paradiplomasi dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat investasi, hilirisasi, dan pembangunan ekonomi daerah apabila dilaksanakan secara terkoordinasi, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, koordinasi pusat-daerah, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan menjadi hal penting agar kerja sama ekonomi internasional tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara*. Bank Indonesia.
- Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara. (2026). *Kolaborasi Maluku Utara dan Korea Dorong Industri Berkelanjutan*. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Maluku Utara.
- BPS Maluku Utara. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Triwulan II-2025*. BPS Maluku Utara.
- Chrystella, D. F., Ibrahim, S., & Lihua, Y. (2025). Maximizing the impact of foreign direct investment: Trends, determinants, and strategies for sustainable economic and social development. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 16(1), 31-50. <https://doi.org/10.9790/5933-1601043150>
- Dermawan, W., Afandi, R. N., & Dermawan, I. (2020). Sosialisasi Diplomasi Daerah dalam Upaya Mengoptimasi Sumber- Sumber Luar Negeri. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12(3).
- Harakan, A., & Taufik, A. (2023). Exploring Paradiplomacy Pathways: Local Government and Foreign Direct Investment Corporation Partnerships for Sustainable Development. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5, 1–18.
- Mukti, T. A. (2020). *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Novialdi, R., & Rassanjani, S. (2022). Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(2), 108-124. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i2.29450>
- Pestovska, Z. (2026). Foreign Policy Subjectivity of Hub Cities: Tools For Sustainable Development and Green Investment In Europe. *Сталий Розвиток Економіки*, 1(58), 842-848. <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2026-58-112>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
- Putri, R. A., Swastiwi, A. W., & Valentina, A. (2026). Paradiplomacy Capacity of the Kepulauan Riau Provincial Government in Optimizing Regional Economic Connectivity. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)*, 5(1), 66–76. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2299>
- Surwandono, S., & Maksum, A. (2020). The architecture of paradiplomacy regime in Indonesia: A content analysis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 77-99. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.443>
- Syam, R., Wisadirana, D., Susilo, E., Nurhadi, I., & Latief, M. I. (2025). Stitching sustainability: local governments as mediators in hybrid environmental governance of mining-lake regions. *Frontiers in Sustainability*, 6, 1745521. <https://doi.org/10.3389/frsus.2025.1745521>
- Syuryansyah, S., Yunazwardi, M. I., & Nihayati, A. (2025). A Systematic Literature Review on Indonesian Paradiplomacy (2018-2024). *Journal of Islamic World and Politics*, 9(2), 155-171.
- Utomo, A. B. (2022). Paradiplomacy as the product of state transformation in the era of globalisation: the case of Indonesia. *Janus. net*, 13(1), 63-78. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.13.1.5>
- Zeng, H., Li, X., Zhou, Q., & Wang, L. (2022). Local government environmental regulatory pressures and corporate environmental strategies: Evidence from natural resource accountability audits in China. *Business Strategy and the Environment*, 31(7), 3060-3082.